BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 92 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN, PEMBAGIAN BESARAN DAN PELAKSANAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu mengatur tata cara penetapan dan pembagian besaran serta petunjuk pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Gampong Tahun 2021 dalam suatu Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Tata Cara Penetapan dan Pembagian Besaran serta Petunjuk Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 4);
17. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN, PEMBAGIAN BESARAN DAN PELAKSANAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pada pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
9. Keuchik adalah kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
10. Tuha Peuet Gampong adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di gampong.
11. Rencana Pembangunan Jangka Pendek Gampong yang selanjutnya disingkat RPJP adalah hasil musyawarah masyarakat gampong tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah Dokumen Perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
13. Qanun Gampong adalah peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang dibuat oleh Tuha Peuet Gampong bersama Keuchik.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
15. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

16. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBK yang dialokasikan kepada gampong berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan gampong.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
19. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut.
20. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan gampong.
21. Tim Pelaksana di tingkat Gampong yang selanjutnya disebut Timlak adalah Tim yang dibentuk oleh Keuchik yang bertugas melaksanakan kegiatan fisik yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
22. Pembinaan adalah pemberian pedoman standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan gampong.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud diberikannya Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pembinaan kemasyarakatan gampong.

(2) Tujuan diberikannya Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong adalah :

a. mewujudkan pemerintahan gampong yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung-jawab;
b. meningkatkan nilai-nilai keagamaan, adat dan sosial budaya dalam rangka penguatan pemerintahan gampong;
c. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
d. memajukan perekonomian masyarakat gampong serta pemberdayaan masyarakat gampong;
e. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat gampong guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
f. mengefektifkan perencanaan pembangunan gampong dengan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat gampong untuk pengembangan potensi dan aset gampong guna kesejahteraan bersama;
g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat gampong guna mewujudkan masyarakat gampong yang mampu memelihara kesatuan sosial;
h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan gampong; dan
i. meningkatkan pendapatan gampong dan ekonomi masyarakat gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong.

BAB III
SUMBER PENDANAAN DAN PENENTUAN BESARAN

Paragraf Kesatu
Sumber Dana

Pasal 3

(1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagi hasil pajak kepada gampong

(2) Pendanaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong bersumber dari APBK.

Paragraf Kedua
Bagi Hasil Pajak Daerah

Pasal 4

(1) Besaran Bagi Hasil Pajak untuk Gampong ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah.

(2) Sumber Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Gampong berasal dari penerimaan pajak daerah yang diterima oleh daerah melalui kas daerah.

(3) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan :
a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh gampong; dan
b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dari masing-masing gampong.

(4) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah setiap gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai berikut :
a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata sejumlah gampong, dengan cara (10% x Hasil Pajak Daerah x 60%) / Jumlah gampong se-Kabupaten.
b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional untuk gampong sesuai kontribusi pemasukan pajak daerah dari masing-masing gampong terhadap total pemasukan pajak gampong se-Kabupaten, dengan cara (10% x Hasil Pajak Daerah x 40%) x (jumlah pemasukan pajak daerah dari gampong yang bersangkutan / total pemasukan pajak daerah dari gampong se-Kabupaten).

Paragraf Ketiga
Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 5

(1) Besaran Bagi Hasil Retribusi untuk Gampong ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan retribusi daerah.

(2) Sumber Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong berasal dari penerimaan retribusi yang diterima oleh daerah melalui kas daerah.

(3) Pengalokasian Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan :

a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh gampong; dan
b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil retribusi dari masing-masing gampong.

(4) Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai berikut :

a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata sejumlah gampong, dengan cara (10% x Hasil Retribusi Daerah x 60%) / Jumlah gampong se-Kabupaten.
b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional untuk gampong sesuai kontribusi pemasukan retribusi daerah dari masing-masing gampong terhadap total pemasukan retribusi gampong se-Kabupaten, dengan cara (10% x Hasil Retribusi Daerah x 40%) x (jumlah pemasukan retribusi daerah dari gampong yang bersangkutan / total pemasukan retribusi daerah dari gampong se-Kabupaten).

Pasal 6

(1) Sumber data dalam perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dan pasal 5 ayat (3) adalah :

a. nama dan kode wilayah gampong bersumber dari Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten;
b. jumlah pemasukan pajak dan retribusi masing-masing gampong dan atau rekapitulasi setiap kecamatan bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

(2) Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk masing-masing gampong dalam Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten wajib membina, mengawasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong,

(2) Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring dilakukan oleh Tim Fasilitasi dan Tim Pendamping.

Pasal 8

(1) Ditingkat Kabupaten dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
   a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong;
   b. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain;
   c. melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong; dan
   d. memberikan laporan kepada Bupati.

Pasal 9

(1) Ditingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
   a. melakukan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong;
   b. melakukan pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong;
   c. melakukan pembinaan administrasi keuangan gampong;
   d. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi; dan
   e. memberikan laporan kepada Tim Koordinasi.

Pasal 10

(1) Keuchik dapat membentuk Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola pada tiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong.

(2) Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

BAB V
PERSYARATAN PENGAJUAN

Pasal 11

(1) Persyaratan pengajuan permohonan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong sebagai berikut :
   a. telah diverifikasi dan direkomendasikan layak untuk mengajukan permohonan penyaluran oleh Tim Fasilitasi dengan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
      1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) telah ditetapkan, serta telah dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten dan / atau didelegasikan kepada Camat.
      2. semua pekerjaan/kegiatan tahun dan atau tahap sebelumnya telah dilaksanakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
      3. telah melakukan pemungutan dan penyetoran PBB berdasarkan target kinerja sesuai ketentuan, untuk tahun sebelumnya dan/atau tahun berkenaan; dan
      4. mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah.
   b. melengkapi/mencukupi dokumen sebagai berikut:
      1. permohonan penyaluran dari Keuchik/Pj. Keuchik kepada Bupati;
      2. fotokopi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Gampong (untuk pengajuan tahap I);
      3. fotokopi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Gampong (untuk pengajuan tahap I);
      4. fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) (untuk pengajuan tahap I

dan tahap II/akhir bila ada perubahan APBG);

5. fotokopi Surat Keputusan (SK) Penunjukan Bank sebagai Penyimpan dan Pencairan (dilegalisir Keuchik/Pj. Keuchik);
6. fotokopi rekening kas gampong (mengetahui Keuchik/Pj. Keuchik);
7. fotokopi Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Keuchik.
8. fotokopi Surat Keputusan (SK) Bendahara Gampong (dilegalisir Keuchik/ Pj.Keuchik);
9. fotokopi KTP Keuchik/Pj. Keuchik, dan Bendahara Gampong;
10. pakta integritas bermeterai cukup;
11. kwitansi penerimaan bermeterai cukup.

(2) Pengecualian dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dapat dilakukan dengan persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 12

(1) Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong dianggarkan setiap tahun dalam APBK.

(2) Bupati menetapkan besaran sementara Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong untuk masing-masing gampong setiap awal tahun anggaran.

(3) Pemerintah Gampong membuka rekening kas gampong pada Bank diwilayahnya atau yang terdekat.

(4) Keuchik mengajukan permohonan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong kepada Bupati melalui Camat.

(5) Camat meneruskan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

(6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten meneruskan berkas permohonan penyaluran berikut lampirannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

(7) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten dengan persetujuan Bupati melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.

(8) Bentuk persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

(9) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong melalui Bank 100%, dengan tahapan yaitu :
a. tahap I pada bulan Juni, sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
b. tahap II pada bulan November, sebesar 60% (enam puluh per seratus).

(10) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat digabungkan bila tahap sebelumnya tidak terealisasi.

(11) Dalam hal terjadi selisih perhitungan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati berdasarkan perhitungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

(12) Apabila terjadi kekurangan atau kelebihan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong pada akhir tahun anggaran berjalan maka akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PENGGUNAAN

Pasal 13

(1) Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pembinaan kemasyarakatan gampong.

(2) Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong mengacu pada RPJMG dan RKPG.

BAB VIII
PENGELOLAAN

Pasal 14

(1) Pengelolaan keuangan gampong dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(2) Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong merupakan bagian dari sumber pendapatan gampong.

(3) Besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong dituangkan dalam Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

(4) Keuchik atau Penjabat Keuchik sebagai pemegang kekuasaan keuangan gampong bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong.

Pasal 15

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBG harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Pengeluaran kas gampong yang mengakibatkan beban APBG tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Qanun Gampong tentang APBG ditetapkan menjadi Qanun Gampong.

(3) Bendahara Gampong sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kegiatan yang dibiayai dengan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Gampong menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

(2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Gampong.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 18

(1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap akhir tahun anggaran kepada Tim Fasilitasi paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

(2) Tim Fasilitasi melaporkan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi.

(3) Dalam hal Keuchik tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

Pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBG.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 29 Desember 2020 M
14 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 29 Desember 2020 M
14 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 92

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 92 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENETAPAN, PEMBAGIAN BESARAN DAN PELAKSANAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah			
				Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah	BHRD Kurang Bayar Tahun 2020	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	11.01.01.2001	KEUDE BAKONGAN	BAKONGAN	4.807.802	6.204.738	1.202.084	12.214.624
2	11.01.01.2002	UJONG MANGKI	BAKONGAN	4.312.299	2.386.771	462.404	7.161.474
3	11.01.01.2003	UJONG PADANG	BAKONGAN	5.348.596	2.386.771	462.404	8.197.771
4	11.01.01.2004	GAMPONG DRIEN	BAKONGAN	4.248.984	2.386.771	462.404	7.098.159
5	11.01.01.2015	DARUL IKHSAN	BAKONGAN	4.034.956	2.386.771	462.404	6.884.131
6	11.01.01.2016	PADANG BEURAHAN	BAKONGAN	4.091.089	2.386.771	462.404	6.940.264
7	11.01.01.2017	GAMPONG BARO	BAKONGAN	6.632.174	2.386.771	462.404	9.481.349
8	11.01.02.2001	FAJAR HARAPAN	KLUET UTARA	6.402.130	2.386.771	462.404	9.251.305
9	11.01.02.2002	KRUENG BATEE	KLUET UTARA	5.280.228	2.386.771	462.404	8.129.403
10	11.01.02.2003	PASI KUALA ASAHAN	KLUET UTARA	7.442.291	2.386.771	462.404	10.291.466
11	11.01.02.2004	GUNONG PULO	KLUET UTARA	4.610.926	2.386.771	462.404	7.460.101
12	11.01.02.2005	PULO IE I	KLUET UTARA	5.495.444	2.386.771	462.404	8.344.619
13	11.01.02.2006	JAMBO MANYANG	KLUET UTARA	5.393.247	2.386.771	462.404	8.242.422
14	11.01.02.2007	SIMPANG EMPAT	KLUET UTARA	11.027.228	3.308.349	640.948	14.976.525
15	11.01.02.2008	LIMAUPURUT	KLUET UTARA	7.908.518	2.386.771	462.404	10.757.693
16	11.01.02.2009	PULO KAMBING	KLUET UTARA	5.177.204	2.386.771	462.404	8.026.379
17	11.01.02.2010	KAMPUNG PAYA	KLUET UTARA	4.853.539	2.386.771	462.404	7.702.714
18	11.01.02.2011	KRUENG BATU	KLUET UTARA	6.044.979	2.386.771	462.404	8.894.154
19	11.01.02.2012	KRUENG KLUET	KLUET UTARA	6.480.106	2.386.771	462.404	9.329.281
20	11.01.02.2013	ALURMAS	KLUET UTARA	6.559.351	2.386.771	462.404	9.408.526
21	11.01.02.2016	SIMPANG LHEE	KLUET UTARA	5.432.377	2.386.771	462.404	8.281.552
22	11.01.02.2017	SUAQ GERINGGENG	KLUET UTARA	3.817.348	2.386.771	462.404	6.666.523
23	11.01.02.2018	PASI KUALA BA'U	KLUET UTARA	8.735.656	2.386.771	462.404	11.584.831
24	11.01.02.2019	KEDAI PADANG	KLUET UTARA	4.349.019	2.386.771	462.404	7.198.194
25	11.01.02.2020	KOTAFAJAR	KLUET UTARA	10.878.064	64.063.232	12.411.379	87.352.675
26	11.01.02.2021	GUNUNG PUDUNG	KLUET UTARA	5.145.101	2.386.771	462.404	7.994.276
27	11.01.02.2022	KAMPUNG TINGGI	KLUET UTARA	5.006.216	2.386.771	462.404	7.855.391
28	11.01.02.2023	RUAK	KLUET UTARA	4.558.804	2.386.771	462.404	7.407.979
29	11.01.03.2018	SUAQ BAKUNG	KLUET SELATAN	7.081.836	2.682.993	519.793	10.284.622
30	11.01.03.2002	RANTAU BINUANG	KLUET SELATAN	4.841.002	2.386.771	462.404	7.690.177
31	11.01.03.2003	BARAT DAYA	KLUET SELATAN	5.216.333	2.386.771	462.404	8.065.508
32	11.01.03.2004	SIALANG	KLUET SELATAN	4.133.573	2.386.771	462.404	6.982.748
33	11.01.03.2005	KAPEH	KLUET SELATAN	5.955.063	2.386.771	462.404	8.804.238
34	11.01.03.2006	PULO IE	KLUET SELATAN	5.418.342	2.386.771	462.404	8.267.517
35	11.01.03.2007	KEDAI RUNDING	KLUET SELATAN	8.287.800	2.386.771	462.404	11.136.975
36	11.01.03.2008	KEDAI KANDANG	KLUET SELATAN	4.160.209	2.386.771	462.404	7.009.384
37	11.01.03.2009	GAMPONG LUAR	KLUET SELATAN	3.495.671	2.386.771	462.404	6.344.846
38	11.01.03.2010	UJUNG	KLUET SELATAN	4.265.981	2.386.771	462.404	7.115.156
39	11.01.03.2011	JUA	KLUET SELATAN	4.149.507	2.386.771	462.404	6.998.682
40	11.01.03.2012	PASI MEURAPAT	KLUET SELATAN	4.127.934	2.386.771	462.404	6.977.109
41	11.01.03.2013	UJUNG PASIR	KLUET SELATAN	3.733.881	2.386.771	462.404	6.583.056
42	11.01.03.2014	GEULUMBUK	KLUET SELATAN	4.859.887	2.386.771	462.404	7.709.062
43	11.01.03.2015	PASIE LEMBANG	KLUET SELATAN	7.099.304	2.386.771	462.404	9.948.479
44	11.01.03.2016	UJUNG PADANG	KLUET SELATAN	5.197.543	2.386.771	462.404	8.046.718
45	11.01.03.2017	INDRA DAMAI	KLUET SELATAN	6.648.854	2.386.771	462.404	9.498.029
46	11.01.04.2001	BAKAU HULU	LABUHANHAJI	5.144.599	2.386.771	462.404	7.993.774
47	11.01.04.2002	PADANG BAKAU	LABUHANHAJI	4.330.462	2.386.771	462.404	7.179.637
48	11.01.04.2003	MANGGIS HARAPAN	LABUHANHAJI	4.781.522	2.386.771	462.404	7.630.697

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah			
				Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah	BHRD Kurang Bayar Tahun 2020	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
49	11.01.04.2004	PASAR LAMA	LABUHANHAJI	5.135.629	82.203.140	15.925.739	103.264.508
50	11.01.04.2005	APHA	LABUHANHAJI	5.405.276	2.386.771	462.404	8.254.451
51	11.01.04.2006	UJUNG BATU	LABUHANHAJI	5.463.586	2.386.771	462.404	8.312.761
52	11.01.04.2007	PAWOH	LABUHANHAJI	4.046.985	2.386.771	462.404	6.896.160
53	11.01.04.2008	DALAM	LABUHANHAJI	4.581.295	2.386.771	462.404	7.430.470
54	11.01.04.2009	KOTA PALAK	LABUHANHAJI	4.439.112	2.386.771	462.404	7.288.287
55	11.01.04.2010	CACANG	LABUHANHAJI	4.486.841	2.386.771	462.404	7.336.016
56	11.01.04.2011	TENGAH PISANG	LABUHANHAJI	3.683.442	2.386.771	462.404	6.532.617
57	11.01.04.2012	PISANG	LABUHANHAJI	4.435.448	2.386.771	462.404	7.284.623
58	11.01.04.2013	HULU PISANG	LABUHANHAJI	4.693.547	2.386.771	462.404	7.542.722
59	11.01.04.2014	TENGAH BARU	LABUHANHAJI	6.443.644	2.386.771	462.404	9.292.819
60	11.01.04.2015	LEMBAH BARU	LABUHANHAJI	4.957.215	2.386.771	462.404	7.806.390
61	11.01.04.2016	PADANG BARU	LABUHANHAJI	4.943.567	2.386.771	462.404	7.792.742
62	11.01.05.2024	KUTA BULOH II	MEUKEK	5.766.181	2.386.771	462.404	8.615.356
63	11.01.05.2002	KUTA BULOH I	MEUKEK	9.154.558	2.386.771	462.404	12.003.733
64	11.01.05.2003	IE DINGEN	MEUKEK	5.622.140	2.386.771	462.404	8.471.315
65	11.01.05.2004	DRIEN JALO	MEUKEK	3.601.050	2.386.771	462.404	6.450.225
66	11.01.05.2005	JAMBO PAPEUN	MEUKEK	5.050.168	2.386.771	462.404	7.899.343
67	11.01.05.2006	BUKIT MEUH	MEUKEK	3.554.826	2.386.771	462.404	6.404.001
68	11.01.05.2007	BLANG KUALA	MEUKEK	4.977.230	2.386.771	462.404	7.826.405
69	11.01.05.2008	ROT TEUNGOH	MEUKEK	4.082.714	2.386.771	462.404	6.931.889
70	11.01.05.2009	ALUE BARO	MEUKEK	4.034.690	2.386.771	462.404	6.883.865
71	11.01.05.2010	LADANG TUHA	MEUKEK	3.745.724	2.386.771	462.404	6.594.899
72	11.01.05.2011	LHOK MAMPLAM	MEUKEK	3.701.967	2.386.771	462.404	6.551.142
73	11.01.05.2012	ARUN TUNGGAI	MEUKEK	5.314.996	2.386.771	462.404	8.164.171
74	11.01.05.2013	BLANG TEUNGOH	MEUKEK	7.166.554	2.386.771	462.404	10.015.729
75	11.01.05.2014	BLANG BLADEH	MEUKEK	4.513.405	2.386.771	462.404	7.362.580
76	11.01.05.2015	IE BUBOH	MEUKEK	3.812.074	2.386.771	462.404	6.661.249
77	11.01.05.2016	KEUDE MEUKEK	MEUKEK	4.158.229	2.386.771	462.404	7.007.404
78	11.01.05.2017	KUTA BARO	MEUKEK	5.484.408	9.792.311	1.897.127	17.173.846
79	11.01.05.2018	TANJUNG HARAPAN	MEUKEK	5.030.198	2.386.771	462.404	7.879.373
80	11.01.05.2019	LABUHAN TAROK	MEUKEK	7.131.871	4.937.568	956.587	13.026.026
81	11.01.05.2020	LHOK AMAN	MEUKEK	4.466.007	2.386.771	462.404	7.315.182
82	11.01.05.2021	ALUE MEUTUAH	MEUKEK	5.327.821	2.386.771	462.404	8.176.996
83	11.01.05.2022	LADANG BARO	MEUKEK	4.039.023	2.386.771	462.404	6.888.198
84	11.01.05.2023	LABUHAN TAROK II	MEUKEK	3.494.679	2.386.771	462.404	6.343.854
85	11.01.06.2001	DALAM	SAMADUA	6.300.574	2.386.771	462.404	9.149.749
86	11.01.06.2002	SUBARANG	SAMADUA	4.598.492	2.386.771	462.404	7.447.667
87	11.01.06.2003	KOTA BARU	SAMADUA	3.596.775	2.386.771	462.404	6.445.950
88	11.01.06.2004	GUNUNG KETEK	SAMADUA	3.819.025	2.386.771	462.404	6.668.200
89	11.01.06.2005	LADANG PANTON LUAS	SAMADUA	3.558.776	2.386.771	462.404	6.407.951
90	11.01.06.2006	MADAT	SAMADUA	3.767.219	2.386.771	462.404	6.616.394
91	11.01.06.2007	ALUR SUMERAH	SAMADUA	3.804.432	2.386.771	462.404	6.653.607
92	11.01.06.2008	TENGAH	SAMADUA	3.824.113	2.386.771	462.404	6.673.288
93	11.01.06.2009	GUNUNG CUT	SAMADUA	5.783.932	2.386.771	462.404	8.633.107
94	11.01.06.2010	ALUR PINANG	SAMADUA	4.277.390	2.386.771	462.404	7.126.565
95	11.01.06.2011	KUTA BLANG	SAMADUA	5.242.343	2.386.771	462.404	8.091.518
96	11.01.06.2012	BATEE TUNGGAI	SAMADUA	5.247.146	2.386.771	462.404	8.096.321
97	11.01.06.2013	UJUNG TANAH	SAMADUA	4.933.950	2.386.771	462.404	7.783.125
98	11.01.06.2014	UJUNG KAMPUNG	SAMADUA	3.526.683	2.386.771	462.404	6.375.858
99	11.01.06.2015	JILATANG	SAMADUA	4.566.636	2.386.771	462.404	7.415.811
100	11.01.06.2016	LUAR	SAMADUA	4.545.588	2.386.771	462.404	7.394.763
101	11.01.06.2017	LUBUK LAYU	SAMADUA	3.559.430	2.386.771	462.404	6.408.605
102	11.01.06.2018	SUAQ HULU	SAMADUA	4.977.025	2.386.771	462.404	7.826.200
103	11.01.06.2019	TAMPANG	SAMADUA	4.106.800	2.386.771	462.404	6.955.975
104	11.01.06.2020	PAYONAN GADANG	SAMADUA	4.187.184	2.386.771	462.404	7.036.359
105	11.01.06.2021	GADANG	SAMADUA	4.866.180	2.386.771	462.404	7.715.355
106	11.01.06.2022	BARU	SAMADUA	4.513.006	2.386.771	462.404	7.362.181

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah			
				Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah	BHRD Kurang Bayar Tahun 2020	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
107	11.01.06.2023	LADANG KASIK PUTIH	SAMADUA	4.508.551	2.386.771	462.404	7.357.726
108	11.01.06.2024	AIR SIALANG HILIR	SAMADUA	3.888.732	2.386.771	462.404	6.737.907
109	11.01.06.2025	AIR SIALANG HULU	SAMADUA	3.755.375	2.386.771	462.404	6.604.550
110	11.01.06.2026	AIR SIALANG TENGAH	SAMADUA	3.667.398	2.386.771	462.404	6.516.573
111	11.01.06.2027	BALAI	SAMADUA	4.935.250	2.386.771	462.404	7.784.425
112	11.01.06.2028	ARAFAH	SAMADUA	5.413.509	2.386.771	462.404	8.262.684
113	11.01.07.2001	SIKULAT	SAWANG	4.192.091	2.386.771	462.404	7.041.266
114	11.01.07.2002	SAWANG I	SAWANG	4.837.639	2.386.771	462.404	7.686.814
115	11.01.07.2003	MEULIGO	SAWANG	4.504.593	2.386.771	462.404	7.353.768
116	11.01.07.2004	LHOK PAWOH	SAWANG	5.042.768	10.039.162	1.944.951	17.026.881
117	11.01.07.2005	SAWANG II	SAWANG	3.765.325	2.386.771	462.404	6.614.500
118	11.01.07.2006	UJUNG KARANG	SAWANG	4.815.819	2.386.771	462.404	7.664.994
119	11.01.07.2007	TRIENG MEUDURO BAROH	SAWANG	7.052.470	2.386.771	462.404	9.901.645
120	11.01.07.2008	TRIENG MEUDURO TUNONG	SAWANG	3.741.428	2.386.771	462.404	6.590.603
121	11.01.07.2009	PANTON LUAS	SAWANG	4.807.702	2.386.771	462.404	7.656.877
122	11.01.07.2010	SIMPANG TIGA	SAWANG	4.683.113	2.386.771	462.404	7.532.288
123	11.01.07.2011	KUTA BARO	SAWANG	5.021.029	2.386.771	462.404	7.870.204
124	11.01.07.2012	BLANG GELINGGANG	SAWANG	4.196.500	2.386.771	462.404	7.045.675
125	11.01.07.2013	MUTIARA	SAWANG	3.323.029	2.386.771	462.404	6.172.204
126	11.01.07.2014	UJUNG PADANG	SAWANG	8.642.352	2.386.771	462.404	11.491.527
127	11.01.07.2015	SAWANG BA'U	SAWANG	4.663.543	52.415.305	10.154.751	67.233.599
128	11.01.08.2017	LHOK KEUTAPANG	TAPAKTUAN	6.179.409	2.386.771	462.404	9.028.584
129	11.01.08.2018	HILIR	TAPAKTUAN	9.940.680	135.603.079	26.271.250	171.815.009
130	11.01.08.2019	PADANG	TAPAKTUAN	5.606.098	2.386.771	462.404	8.455.273
131	11.01.08.2020	HULU	TAPAKTUAN	4.557.592	2.386.771	462.404	7.406.767
132	11.01.08.2021	JAMBO APHA	TAPAKTUAN	12.296.316	2.386.771	462.404	15.145.491
133	11.01.08.2022	TEPI AIR	TAPAKTUAN	3.478.783	2.386.771	462.404	6.327.958
134	11.01.08.2023	PASAR	TAPAKTUAN	7.055.393	34.723.470	6.727.199	48.506.062
135	11.01.08.2024	LHOK BENGKUANG	TAPAKTUAN	6.799.420	3.045.041	589.935	10.434.396
136	11.01.08.2009	PANTON LUAS	TAPAKTUAN	3.789.069	2.386.771	462.404	6.638.244
137	11.01.08.2010	GUNUNG KERAMBIL	TAPAKTUAN	4.368.149	2.386.771	462.404	7.217.324
138	11.01.08.2011	AIR BERUDANG	TAPAKTUAN	4.344.574	2.386.771	462.404	7.193.749
139	11.01.08.2012	BATU ITAM	TAPAKTUAN	5.737.715	2.386.771	462.404	8.586.890
140	11.01.08.2013	PANJUPIAN	TAPAKTUAN	6.160.983	2.386.771	462.404	9.010.158
141	11.01.08.2014	LHOK RUKAM	TAPAKTUAN	4.654.491	2.386.771	462.404	7.503.666
142	11.01.08.2015	AIR PINANG	TAPAKTUAN	6.578.027	2.386.771	462.404	9.427.202
143	11.01.08.2016	LHOK BENGKUANG TIMUR	TAPAKTUAN	7.526.427	21.196.842	4.106.599	32.829.868
144	11.01.09.2001	KEUDE TRUMON	TRUMON	6.838.475	2.386.771	462.404	9.687.650
145	11.01.09.2002	UJONG TANOH	TRUMON	7.719.629	3.193.152	618.630	11.531.411
146	11.01.09.2003	SIGLENG	TRUMON	4.471.904	2.386.771	462.404	7.321.079
147	11.01.09.2004	IE MEUDAMA	TRUMON	6.692.841	2.386.771	462.404	9.542.016
148	11.01.09.2005	TEUPIN TINGGI	TRUMON	6.085.169	2.597.418	503.214	9.185.801
149	11.01.09.2006	KUTA BARO	TRUMON	5.934.366	2.386.771	462.404	8.783.541
150	11.01.09.2007	PANTON BILIE	TRUMON	7.458.570	2.386.771	462.404	10.307.745
151	11.01.09.2012	KUTA PADANG	TRUMON	5.687.809	2.567.795	497.475	8.753.079
152	11.01.09.2013	RAKET	TRUMON	3.807.278	2.386.771	462.404	6.656.453
153	11.01.09.2014	GAMPONG TEUNGOH	TRUMON	3.811.361	2.386.771	462.404	6.660.536
154	11.01.09.2015	SENEUBOK JAYA	TRUMON	5.547.599	2.386.771	462.404	8.396.774
155	11.01.09.2016	PADANG HARAPAN	TRUMON	4.284.309	2.386.771	462.404	7.133.484
156	11.01.10.2001	LADANG TEUNGOH	PASIE RAJA	4.749.824	2.386.771	462.404	7.598.999
157	11.01.10.2002	PUCOK KRUENG	PASIE RAJA	4.100.464	2.386.771	462.404	6.949.639
158	11.01.10.2003	SILOLO	PASIE RAJA	4.786.483	2.386.771	462.404	7.635.658
159	11.01.10.2004	KAMPUNG BARU	PASIE RAJA	4.249.854	2.386.771	462.404	7.099.029
160	11.01.10.2005	PANTON BILI	PASIE RAJA	3.927.271	2.386.771	462.404	6.776.446
161	11.01.10.2006	PAYA ATEUK	PASIE RAJA	6.133.001	2.386.771	462.404	8.982.176
162	11.01.10.2007	LADANG TUHA	PASIE RAJA	5.733.376	3.621.028	701.525	10.055.929
163	11.01.10.2008	MATA IE	PASIE RAJA	4.310.450	2.386.771	462.404	7.159.625
164	11.01.10.2009	UJONG BATEE	PASIE RAJA	4.985.068	2.386.771	462.404	7.834.243

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah			
				Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah	BHRD Kurang Bayar Tahun 2020	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
165	11.01.10.2010	LHOK SIALANG CUT	PASIE RAJA	4.032.777	2.386.771	462.404	6.881.952
166	11.01.10.2011	SEUNEUBOK	PASIE RAJA	6.615.706	2.386.771	462.404	9.464.881
167	11.01.10.2012	IE MIRAH	PASIE RAJA	4.486.353	2.386.771	462.404	7.335.528
168	11.01.10.2013	PASIE RASIAN	PASIE RAJA	5.079.615	2.386.771	462.404	7.928.790
169	11.01.10.2014	UJUNG PADANG RASIAN	PASIE RAJA	4.358.218	2.386.771	462.404	7.207.393
170	11.01.10.2015	KRUENG KALEE	PASIE RAJA	3.976.150	2.386.771	462.404	6.825.325
171	11.01.10.2016	LHOK SIALANG RAYEUK	PASIE RAJA	5.059.821	2.386.771	462.404	7.908.996
172	11.01.10.2017	GAMPONG BARO	PASIE RAJA	4.802.884	2.386.771	462.404	7.652.059
173	11.01.10.2018	TEUPIN GAJAH	PASIE RAJA	3.990.365	2.386.771	462.404	6.839.540
174	11.01.10.2019	UJUNG PADANG ASAHAN	PASIE RAJA	8.449.438	2.386.771	462.404	11.298.613
175	11.01.10.2020	PULO IE II	PASIE RAJA	4.603.907	2.386.771	462.404	7.453.082
176	11.01.10.2021	PANTE RAJA	PASIE RAJA	4.346.990	2.386.771	462.404	7.196.165
177	11.01.11.2001	TENGAH PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	6.361.424	2.386.771	462.404	9.210.599
178	11.01.11.2002	PAYA PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	4.331.835	2.386.771	462.404	7.181.010
179	11.01.11.2003	PADANG PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	3.916.322	2.386.771	462.404	6.765.497
180	11.01.11.2004	AUR PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	6.507.886	2.386.771	462.404	9.357.061
181	11.01.11.2005	LIMAU SARING	LABUHANHAJI TIMUR	4.719.967	2.386.771	462.404	7.569.142
182	11.01.11.2006	BEUTONG	LABUHANHAJI TIMUR	4.487.656	2.386.771	462.404	7.336.831
183	11.01.11.2007	PEUNEULOP	LABUHANHAJI TIMUR	3.807.940	2.386.771	462.404	6.657.115
184	11.01.11.2008	GUNUNG ROTAN	LABUHANHAJI TIMUR	5.490.068	2.386.771	462.404	8.339.243
185	11.01.11.2009	KEUMUMU HILIR	LABUHANHAJI TIMUR	5.607.746	2.386.771	462.404	8.456.921
186	11.01.11.2010	KEUMUMU HULU	LABUHANHAJI TIMUR	4.598.066	2.386.771	462.404	7.447.241
187	11.01.11.2011	KEUMUMU SEBERANG	LABUHANHAJI TIMUR	4.552.376	2.386.771	462.404	7.401.551
188	11.01.11.2012	SAWANG INDAH	LABUHANHAJI TIMUR	4.152.576	2.386.771	462.404	7.001.751
189	11.01.12.2001	TUTONG	LABUHANHAJI BARAT	5.475.424	2.386.771	462.404	8.324.599
190	11.01.12.2002	TENGAH IBOH	LABUHANHAJI BARAT	5.126.667	2.386.771	462.404	7.975.842
191	11.01.12.2003	PEULOKAN	LABUHANHAJI BARAT	5.750.363	2.386.771	462.404	8.599.538
192	11.01.12.2004	KUTA IBOH	LABUHANHAJI BARAT	4.935.196	2.386.771	462.404	7.784.371
193	11.01.12.2005	UJUNG PADANG	LABUHANHAJI BARAT	3.564.336	2.386.771	462.404	6.413.511
194	11.01.12.2006	BLANG BARU	LABUHANHAJI BARAT	7.783.917	2.386.771	462.404	10.633.092
195	11.01.12.2007	BLANG POROH	LABUHANHAJI BARAT	4.685.495	2.386.771	462.404	7.534.670
196	11.01.12.2008	PULO IE	LABUHANHAJI BARAT	4.573.143	2.386.771	462.404	7.422.318
197	11.01.12.2009	SUAK LOKAN	LABUHANHAJI BARAT	7.960.751	2.386.771	462.404	10.809.926
198	11.01.12.2010	IKU LHUENG	LABUHANHAJI BARAT	3.286.018	2.386.771	462.404	6.135.193
199	11.01.12.2011	KUTA TRIENG	LABUHANHAJI BARAT	5.622.712	2.386.771	462.404	8.471.887
200	11.01.12.2012	PANTE GEULIMA	LABUHANHAJI BARAT	4.284.415	2.386.771	462.404	7.133.590
201	11.01.12.2013	PANTON PAWOH	LABUHANHAJI BARAT	5.184.417	2.386.771	462.404	8.033.592
202	11.01.12.2014	BATEE MEUCANANG	LABUHANHAJI BARAT	5.554.597	2.386.771	462.404	8.403.772
203	11.01.12.2015	PANTON RUBEEK	LABUHANHAJI BARAT	4.449.881	2.386.771	462.404	7.299.056
204	11.01.13.2001	KOTO	KLUET TENGAH	5.532.608	3.497.602	677.613	9.707.823
205	11.01.13.2002	ALUR KEUJRUN	KLUET TENGAH	5.473.748	2.386.771	462.404	8.322.923
206	11.01.13.2003	JAMBOR PAPAN	KLUET TENGAH	4.818.497	2.386.771	462.404	7.667.672
207	11.01.13.2004	MALAKA	KLUET TENGAH	4.224.726	2.386.771	462.404	7.073.901
208	11.01.13.2005	KOTO INDARUNG	KLUET TENGAH	5.005.240	2.386.771	462.404	7.854.415
209	11.01.13.2006	SIURAI-URAI	KLUET TENGAH	5.188.472	2.386.771	462.404	8.037.647
210	11.01.13.2007	KAMPUNG SAWAH	KLUET TENGAH	3.900.226	2.386.771	462.404	6.749.401
211	11.01.13.2008	KAMPUNG PADANG	KLUET TENGAH	6.609.854	2.386.771	462.404	9.459.029
212	11.01.13.2009	PULO AIR	KLUET TENGAH	4.523.152	2.386.771	462.404	7.372.327
213	11.01.13.2010	LAWE MELANG	KLUET TENGAH	5.553.359	2.386.771	462.404	8.402.534
214	11.01.13.2011	MERSAK	KLUET TENGAH	3.765.407	2.386.771	462.404	6.614.582
215	11.01.13.2014	SIMPANG DUA	KLUET TENGAH	3.896.941	2.386.771	462.404	6.746.116
216	11.01.13.2015	SIMPANG TIGA	KLUET TENGAH	3.896.847	2.386.771	462.404	6.746.022
217	11.01.14.2001	PAYA DAPUR	KLUET TIMUR	3.840.452	2.386.771	462.404	6.689.627
218	11.01.14.2002	SAPIK	KLUET TIMUR	3.153.012	2.386.771	462.404	6.002.187
219	11.01.14.2003	ALAI	KLUET TIMUR	5.587.629	2.386.771	462.404	8.436.804
220	11.01.14.2004	DURIAN KAWAN	KLUET TIMUR	5.830.644	2.452.598	475.157	8.758.399
221	11.01.14.2005	LAWE SAWAH	KLUET TIMUR	6.762.812	2.386.771	462.404	9.611.987
222	11.01.14.2006	LAWE BULUH DIDI	KLUET TIMUR	4.025.924	2.386.771	462.404	6.875.099